

Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Provinsi DIY

Haryadi*; Sunarto; Sugiyarto

Pascasarjana Program Studi Biosain

Universitas Sebelas Maret

Jalan Ir.Sutami No 36 A Kentingan, Surakarta, 57126, Jawa Tengah, Indonesia

*E-mail: haryadi@student.uns.ac.id

Abstrak - Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang mempunyai fungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. TNGM memiliki karakter yang unik karena terletak pada kawasan gunung berapi yang masih aktif dan secara periodik masih sering mengeluarkan material vulkanik dari dalamnya. Selain kegiatan restorasi, pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola kawasan TNGM merupakan kunci dari kembalinya keanekaragaman hayati pasca erupsi. Penyusunan strategi pengelolaan kawasan TNGM menjadi penting, agar kawasan tersebut tetap terjaga fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan melalui analisis SWOT serta wawancara dengan masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbatasan langsung dengan TNGM serta pengelola TNGM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi SO (strength-opportunity) dapat digunakan untuk mengelola kawasan TNGM, yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan. Kerjasama antara para stakeholder dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan TNGM juga diperlukan, agar tidak terjadi tumpang-tindih keperluan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Taman Nasional, Gunung Merapi, Cangkringan

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan hutan, memiliki banyak potensi untuk di manfaatkan serta perlu dilakukan pengelolaan agar kelestariannya tetap terjaga. Berdasarkan fungsinya, hutan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi (Ministry of Environment and Forestry Indonesia, 2018). Hutan konservasi merupakan kawasan hutan Negara dengan karakteristik tertentu, yang memiliki fungsi dasar melestarikan keanekaragaman flora, fauna dan ekosistem di dalamnya.

Salah satu bentuk hutan konservasi adalah Taman Nasional, menurut Winara (2011) taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang diharapkan dapat memberikan jalan tengah dalam pengelolaan kawasan konservasi antara tujuan perlindungan dan pemanfaatan. Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) merupakan salah satu taman nasional yang terletak di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gunung Merapi ditetapkan sebagai taman nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 134/Kpts-II/2004 tanggal 14 Mei 2004 dengan total luas kawasan kurang lebih 6.410 Hektar. TNGM merupakan kawasan yang unik sekaligus memiliki peran yang penting, karena berada di Gunung Berapi yang masih aktif dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan sumber air dan penyangga sistem kehidupan.

Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kawasan Gunung Merapi banyak memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di dalam hutan tersebut, sehingga terbentuk interaksi yang kuat antara masyarakat dan hutan di kawasan Merapi. Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan strategi pengelolaan kawasan TNGM yang melibatkan masyarakat sebagai pengawas di dalamnya.

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan TNGM dari faktor internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi institusi pengelola yaitu Balai TNGM khususnya Resort Cangkringan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan peran serta masyarakat tentang pengelolaan kawasan TNGM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi awal untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan oleh stakeholder terkait dalam mengelola kawasan TNGM.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019. Tempat lokasi penelitian di Dusun Kalitengah Lor, Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Resort Pengelola Taman Nasional (RPTN-Cangkringan).

2.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang diambil langsung di lapangan yaitu hasil wawancara dengan masyarakat dan instansi terkait menggunakan kuesioner. Data sekunder yang digunakan adalah literatur dan undang-undang yang berkaitan dengan kajian penelitian.

2.3. Analisis Data

Analisis SWOT merupakan pendekatan yang digunakan dalam rangka pemilihan alternatif kebijakan pengelolaan hutan TNGM. Analisis SWOT dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya perumusan faktor internal dan faktor eksternal, penyusunan kuesioner SWOT, analisis faktor internal dan eksternal, pembobotan internal factor analysis system (IFAS) dan external factor analysis system (EFAS), serta perumusan strategi. Perumusan indikator-indikator faktor internal dan eksternal dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan TNGM.

Pendekatan yang dilakukan untuk merumuskan faktor internal dan eksternal dilakukan melalui kajian pustaka, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan Kepala Resort Pengelola Taman Nasional Cangkringan sebagai narasumber yang mengetahui permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengetahuan Masyarakat Terhadap TNGM

Masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kawasan konservasi seperti di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), masyarakat perlu menjadi bagian inti dari suatu rencana pengelolaan kawasan TNGM. Salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGM adalah Dusun Kalitengah Lor, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan. Dusun tersebut merupakan wilayah pemukiman penduduk yang berada paling utara di Kabupaten Sleman.

Penduduk di Dusun Kalitengah Lor, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tambang pasir. Secara umum, masyarakat telah mengetahui penetapan Gunung Merapi sebagai kawasan taman nasional. Pada penelitian ini, sebanyak 65% responden di Dusun Kalitengah Lor telah mengetahui batas kawasan TNGM. Pasca penetapan kawasan Gunung Merapi sebagai kawasan Taman Nasional, 40% responden menganggap kondisi kawasan tersebut lebih baik dari sebelumnya.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan hutan di TNGM juga tinggi, sehingga 95% responden menyatakan belum pernah mendengar adanya penebangan liar di kawasan tersebut. Melalui pengetahuan yang luas mengenai TNGM, masyarakat dapat dijadikan sebagai pelindung dan juga sekaligus sebagai pengawas TNGM. Peran serta masyarakat merupakan salah satu alternatif pilihan strategi yang dapat digunakan untuk mengelola kawasan TNGM. Sebagai sebuah strategi, maka suatu kebijakan pemerintah berkaitan dengan TNGM akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga keputusan tersebut memiliki kredibilitas (Wulandari, 2016).

3.2. Strategi Pengelolaan Kawasan TNGM

Analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan antara faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman, serta faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor internal dimasukkan ke dalam matrik faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analisis Summary*). Sedangkan faktor eksternal dimasukkan ke dalam matrik faktor strategi eksternal EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analisis Summary*).

Tabel 1. Matriks Interaksi IFAS-EFAS Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p>Strength:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Kelembagaan/ Organisasi BTNGM (mengelola kawasan ± 6.410 ha di 4 Kabupaten dan 2 Propinsi), dalam upaya pengelolaan kawasan TNGM. 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balai TNGM dalam upaya pengelolaan kawasan hutanTNGM. 3. Keindahan alam TNGM seperti air terjun, hutan pinus dengan banyak potensi 4. Efektivitas UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya dalam upaya pengelolaan kawasan hutan TNGM. 5. Program restorasi pasca Gunung Merapi erupsi pada tahun 2010 <p style="text-align: center;">(Bobot = 1,88)</p>	<p>Weakness:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM Balai TNGM dalam upaya pengelolaan kawasan hutanTNGM. 2. Moralitas, etika profesi, sikap prilaku Sumber Daya Manusia BTNGM dalam upaya pengelolaan kawasan. 3. Jumlah dana yang memadai dalam upaya pengelolaan kawasan TNGM. 4. Koordinasi Balai TNGM sebagai pengelola kawasan dengan Pemda dan instansi lainnya 5. Kondisi Tanda Batas TNGM yang ada di lapangan dalam mendukung penegakan hukum terhadap aktifitas illegal dalam kawasan. 6. Sarana prasarana dalam mendukung pengelolaan TNGM. 7. Program Pembibitan Tumbuhan Asli Merapi <p style="text-align: center;">(Bobot = 1,87)</p>
<p>Opportunity:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keteraturan ketersediaan dana dari segi jumlah dan waktu pencairannya. 2. Dukungan LSM lokal (termasuk perguruan tinggi) dalam upaya pengelolaan kawasan hutan TNGM. 3. Budaya masyarakat dalam upaya pengelolaan kawasan hutan TNGM. 4. Tingkat kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya TNGM serta peran aktifnya. 5. Dukungan aparat keamanan (Polisi, TNI) dalam rangka upaya pengurangan/ penanggulangan kerusakan hutan di TNGM <p style="text-align: center;">(Bobot = 2,72)</p>	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan organisasi kelembagaan BTNGM dan kualitas SDM dengan memanfaatkan ketersediaan dana. 2. Meningkatkan pengembangan TNGM sebagai kawasan wisata melalui dukungan budaya untuk memelihara kelestarian alam. 3. Mengefektifkan program restorasi dengan dukungan peran serta masyarakat. 4. Mengefektifkan pelaksanaan UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDA serta dukungan dari aparat keamanan dalam pemberian sanksi dan efek jera terhadap penyebab kerusakan TNGM <p style="text-align: center;">SO = 4,60</p>	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan jumlah SDM, sarana prasarana dan kegiatan pembibitan dengan memanfaatkan keteraturan dana. 2. Penyediaan dana yang memadai untuk mendukung kegiatan budaya dan meningkatkan peran serta masyarakat. 3. Menambah koordinasi BTNGM dengan Pemda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan TNGM 4. Penyediaan dana untuk perbaikan tanda batas serta memanfaatkan dukungan aparat keamanan untuk mereduksi gangguan kawasan. <p style="text-align: center;">WO = 4,59</p>
<p>Threat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemda setempat berupa kegiatan/dana dan yang lainnya 2. Efektifitas deklarasi dan implementasi dukungan 	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kelestarian dan mengembalikan keindahan alam melalui restorasi untuk mengurangi ancaman konversi hutan alam menjadi ladang 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan penambahan SDM dan sarana prasarana dengan meningkatkan dana yang memadai dalam pengelolaan kawasan TNGM.

<p>pemda di 2 propinsi dan 5 kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengaruh terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah</p> <p>4. Konversi hutan alam menjadi ladang dan untuk budidaya rumput. (Bobot = 0,76)</p>	<p>budidaya rumput.</p> <p>2. Mengefektifkan pelaksanaan UU No 5 Tahun 1990 untuk meningkatkan dukungan Pemda dan LSM.</p> <p>3. Meningkatkan pengembangan TNGM sebagai kawasan wisata untuk meningkatkan pendapatan daerah. ST = 2,64</p>	<p>2. Meningkatkan koordinasi antara BTNGM dengan pemda melalui kegiatan kerjasama untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa merusak fungsi TNGM.</p> <p>3. Mengadakan kerjasama dengan LSM Lokal untuk program pembibitan WT = 2,63</p>
---	---	--

Untuk mendapatkan prioritas dan keterkaitan antar strategi, hasil dari pembobotan IFAS dan EFAS dilakukan interaksi kombinasi dari faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga diperoleh empat macam strategi, yaitu: strategi strength-opportunity (SO), strategi strength-threat (ST), strategi weakness-opportunity (WO) dan strategi weakness-threat (WT). Hasil perumusan strategi-strategi SO, ST, WO dan WT, disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil interaksi IFAS-EFAS, Strategi Strenght-Opportunity (SO) memiliki bobot tertinggi dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi tersebut adalah strategi untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Lembaga Pengelola TNGM untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pilihan strategi SO yang mendapatkan prioritas bobot tertinggi, dapat dikombinasikan dengan melaksanakan strategi lainnya baik WO, ST, dan WT sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilaksanakan apabila sumberdaya yang ada mendukung untuk melaksanakan semua strategi tersebut.

Strategi Strenght-Opportunity yang terpilih berdasarkan analisis SWOT memiliki beberapa strategi kebijakan diantaranya adalah meningkatkan organisasi kelembagaan BTNGM dan kualitas SDM dengan memanfaatkan ketersediaan dana. Pengembangan kelembagaan adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, keefektifan dan responsibility kinerja lembaga serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun beberapa program pengembangan organisasi kelembagaan TNGM, mencakup beberapa kegiatan umum seperti analisa beban kerja dan kebutuhan personil, serta analisa penyesuaian struktur organisasi Taman Nasional Gunung Merapi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Potensi alam seperti Bukit Plawangan Turgo, Telogo Muncar hingga Pendakian Gunung Merapi merupakan sebagian dari potensi wisata alam yang ditawarkan di kawasan Gunung Merapi. Selain potensi wisata alam, kegiatan budaya masyarakat sekitar, seperti upacara tradisional Labuhan Merapi, Merti Bumi dan Sedekah Gunung juga memiliki daya tarik bagi wisatawan.

Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan meningkatkan pengembangan TNGM sebagai kawasan wisata melalui dukungan budaya untuk memelihara kelestarian alam. Melalui pengembangan wisata alam di kawasan TNGM diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kegiatan konservasi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan TNGM. Pengembangan wisata alam perlu dilakukan perencanaan yang matang sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada kawasan TNGM yang memiliki peran sebagai kawasan konservasi.

Letak TNGM yang berada di kawasan gunung berapi yang sangat aktif, menjadikannya sebagai sebuah ancaman. Erupsi yang dapat terjadi kapan saja dapat merusak ekosistem yang ada. Menurut Surono (2012), pada tahun 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi terbesar dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Akibatnya vegetasi tumbuhan mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat mulai kerusakan ringan hingga kerusakan berat (vegetasi habis terbakar) (Kemenhut, 2013).

Gunung merapi yang masih sering mengalami erupsi secara periodik membutuhkan pengelolaan yang sesuai dengan tingkat kerusakannya. Lokasi yang tidak dilalui aliran lahar panas erupsi merapi memerlukan pengelolaan yang berbeda dengan daerah yang dialiri

langsung awan panas pada saat erupsi. Pada lahan yang tidak dilalui aliran lahar panas, perlu dilakukan restorasi untuk mengembalikan fungsi ekologi kawasan TNGM yang terdampak. Stakeholder dapat mengefektifkan program restorasi tersebut dengan dukungan peran serta masyarakat.

Secara alami ekosistem memiliki kemampuan memulihkan dirinya sendiri setelah mengalami gangguan atau resiliensi. Namun terdapat beberapa ekosistem yang memerlukan bantuan atau campur tangan manusia agar dapat melestarikan fungsi dan strukturnya. Salah satu kegiatan yang dapat diupayakan yaitu melalui kegiatan restorasi. Restorasi merupakan usaha untuk memicu dan mempercepat pemulihan ekosistem (Kemenhut, 2013).

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal tersebut, arahan kebijakan pengelolaan kawasan TNGM yang selanjutnya adalah dengan mengefektifkan pelaksanaan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan TNGM. Saat ini pengelolaan TNGM mengacu pada prinsip kemitraan (pengelolaan kolaboratif). Menurut Narsuka (2009), melalui kegiatan kemitraan dengan masyarakat di sekitar kawasan TNGM masyarakat dapat terlibat atau memiliki peranserta dalam pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari dalam upaya mengembangkan rasa memiliki sekaligus bertanggung jawab dan mempertahankan keutuhan kawasan TNGM dengan segala fungsinya.

3.3. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan TNGM

Berdasarkan hasil identifikasi faktor eksternal dan faktor internal dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya TNGM serta peran aktifnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi dalam mengelola kawasan TNGM. Hasil wawancara dengan masyarakat Kalitengah Lor sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGM. 70% responden menyatakan akan turut serta dalam mengelola kawasan TNGM apabila ada pihak yang ikut melibatkan mereka.

Sejauh ini masyarakat belum banyak terlibat dalam kegiatan pengelolaan kawasan TNGM. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, masyarakat hanya dilihat sebagai objek yang perlu dikembangkan kesadarannya, melalui tanggung jawab terhadap kawasan lindung. Menurut Supriatna (2008), pendekatan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian keanekaragaman hayatinya.

Secara umum kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh TNGM terhadap masyarakat sekitar kawasan belum dilaksanakan secara menyeluruh. Kegiatan kerjasama masih bersifat umum dan belum menjangkau masyarakat secara luas dan mendalam (Narsuka, 2009). Masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kawasan konservasi seperti di Taman Nasional Gunung Merapi, masyarakat perlu menjadi bagian inti dari suatu rencana pengelolaan kawasan TNGM.

Masyarakat yang telah terbiasa menggunakan produk dari kawasan Gunung Merapi secara tradisional sebelum ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional, apabila dilarang untuk memasuki kawasan mengakibatkan masyarakat kehilangan sumberdaya alam yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Sehingga dapat dirumuskan bahwa pengelolaan taman nasional haruslah melibatkan masyarakat secara aktif pada semua tahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi kegiatan taman nasional.

4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

Taman Nasional Gunung Merapi memiliki fungsi yang bernilai penting dan strategis sehingga pengelolaannya perlu melibatkan seluruh stakeholder terkait melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak balai taman nasional selaku pengelola kawasan. Dari beberapa strategi yang dihasilkan belum tentu semua dapat dilaksanakan, sehingga perlu ditentukan prioritas kebijakan. Agar penelitian ini dapat di aplikasikan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kajian faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman dalam pengelolaan kawasan TNGM.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kehutanan. 2013. Restorasi Ekosistem Gunung Merapi Pasca Erupsi. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan.
- Ministry of Environment and Forestry RI. 2018. The State of Indonesia's Forest 2018. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry RI
- Narsuka, Dwi Retnowati., dan Sujali. (2009, September). Persepsi dan Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan TNGM. *Majalah Geografi Indonesia*. Vol.23 (2), 90 - 108.
- Surono et al.,. (2012). The 2010 Explosive Eruption of Java's Merapi Volcano - A 100 - year Event. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 241, 121 - 135. doi:10.1016/j.jvolgeores.2012.06.018
- Winara, Aji., dan Abdullah Syarief Mukhtar. (2011). Potensi Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Papua. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. Volume 8 (3), 217 - 226.